



RADIKALISME NEGARA DAN KEKUASAAN PERSPEKTIF POLITIK GLOBAL

M. Sidi Ritaudin
IAIN Raden Intan Lampung
penahoo_sidi@yahoo.co.id

Abstrak

Meskipun tragedi kemanusiaan yang berbasis terorisme bersifat domestik regional, tetapi sebab musababnya, setelah dilakukan penelusuran secara kritis dan tajam serta mendalam oleh para ahli, adalah dimensi politik global. Ini bukan asumsi tetapi fakta dan realita. Sebut saja misalnya tragedi WTC di Amerika Serikat 11 September 2001, yang berbuntut pada pembumihangusan Irak, pembantaian dan pembunuhan secara keji di Palestina. Dan saat ini terjadi pembumihangusan Irak jilid dua dengan peristiwa ISIS, tragedi kemanusiaan di Ukraina dan Somalia. Sebahagian pemerhati Islam dan Timur Tengah menengarai bahwa motif gerakan radikalisme merupakan antitesa dari keserakahan politik, ekonomi, kekuasaan dan keangkuhan peradaban. Paradoksal radikalisme Islam dengan para aktivis pengusung ide sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama sudah berlangsung cukup lama dan tiada berkesudahan, menarik untuk didiskusikan.

Abstract

RADICALISM, STATE AND POLITICAL POWER IN GLOBAL PERSPECTIVE. Despite most of the human tragedy of terrorism are based on regional, domestic factors, but its triggers, according to some observers, are frequently related to the dynamics of global politics. This argument can be found in several incident such as : the WTC tragedy of 11 September 2001 in the United States, Iraqi invasion during the reign of Saddam Hussein, the phenomenon of ISIS, and civil wars in Ukraine and Somalia. Some of the Islamic Middle East observers suggest that the motive for the radical movement is in response to the greed and arrogance of the superpower in the political, economic, and military sectors . This article attempts to

explore the paradoxical phenomenon that has lasted a long time, and tends to be everlasting, between the Islamic radical movements, on one hand, and the bearers of the democratic idea and secularization, on the other hand.

Kata Kunci: Radikalisme; politik global; politik kepentingan; anarkisme; kekerasan atas nama agama.

A. Pendahuluan

Persoalan Islam radikal sudah menjadi persoalan politik bangsa-bangsa. Dalam konteks pemikiran politik global, realitas politik standar ganda Amerika Serikat (AS) dan sekutunya merupakan sumbu pemicu yang menyulut berkembangnya radikalisme Islam. Paradigma radikalisme terus dikembangkan menjadi terorisme untuk dapat menghancurkan Islam yang telah diklaim menjadi ancaman serius bagi mereka. Perkembangan ini semakin menguat setelah terjadinya tragedi WTC pada 11 September 2001. Dewasa ini isu terorisme yang dituduhkan oleh AS dan sekutunya semakin kencang lagi setelah kelompok ISIS secara terang-terangan menentang mereka, sehingga tragedi kemanusiaan dengan alasan fundamentalisme, terorisme atau radikalisme semakin mendunia, terutama di dunia Islam seperti di Irak, Suria, Yaman, Palistina, Somalia dan lain sebagainya.

Hal ihwal tragedi demi tragedi berupa pembunuhan masal secara keji dan kejam oleh Amerika Serikat, Yahudi dan sekutunya di samping telah menuduh orang-orang Islam sebagai pelakunya juga telah menyamakan berbagai gerakan Islam militan dengan gerakan teroris. Selain itu, AS dan aliansinya bukan hanya menghukum tertuduh pemboman WTC tanpa bukti, yakni jaringan al-Qaeda serta rezim Taliban Afganistan yang menjadi pelindungnya, tetapi juga melakukan operasi penumpasan terorisme yang melebar ke banyak gerakan Islam lain di beberapa negara, termasuk Indonesia.¹ Sekarang ini terjadi pembumihangusan Irak jilid dua dengan dan atas nama terorisme yang dimotori oleh ISIS (*Islamic State of Iraq and Siria*), sebagai musuh utama AS dan sekutunya.

¹ Endang Turmudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 2.

Realitas politik global yang demikian itu direspon telah mendiskreditkan Islam, sehingga hal ini telah memicu kalangan Islam Fundamentalis untuk bereaksi keras dengan menampilkan diri sebagai gerakan radikal, yang di antaranya menampilkan simbol-simbol anti-AS, Yahudi dan sekutunya. Kondisi ini telah menyebabkan sebagian Muslim memberikan reaksi yang kurang proporsional, seperti gerakan memboikot komoditi dari produk-produk Amerika dan Yahudi. Mereka bersikukuh dengan nilai Islam, seraya memberikan “perlawanan” yang sifatnya anarkis. Sikap sebagian Muslim seperti ini kemudian diidentifikasi sebagai gerakan radikal. Kemunculan gerakan radikal ini pada akhirnya menimbulkan wacana radikalisme yang dipahami sebagai aliran Islam garis keras tidak saja di Indonesia, melainkan secara global telah menjalar ke seantero dunia.

Kebencian dan anti Barat agaknya menemukan relevansinya dalam wacana intelektual muslim pergerakan modern dunia Islam yang dimotori oleh para pendekar pergerakan seperti para idiolog Ikhwanul Muslimin, terutama Sayyid Quṭb di Mesir dan Abu al-A’la al-Maududi di Pakistan. Pada dasarnya, istilah radikalisme sebenarnya bukan merupakan konsep yang asing. Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi radikalisme, yaitu :

Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.

Kedua, produktifitas radikalisme yang tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Tatanan lain yang dimaksud adalah implementasi penegakan syari’ah Islam dalam negara, karena hanya Islam yang mengandung ajaran dan tata nilai yang sempurna, holistik dan mandiri dalam arti tidak membutuhkan ideologi Barat yang sekuler. Kaum radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata ‘radic’, sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar dari semua

sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan negara.

Ketiga adalah bahwa kelompok radikal ini memiliki suatu keyakinan yang sangat kuat terhadap kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan panafian kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti ‘kerakyatan’ atau kemanusiaan, yang dibarengi dengan sikap emosional dan memberi penilaian bahwa hanya arah dan keyakinan mereka sajalah yang mengandung kebenaran. Bahkan Sayyid Quṭb membagi masyarakat, secara ekstrim, menjadi dua golongan yaitu masyarakat yang terdiri dari golongan Allah (*hizbullah*) dan *vis a vis* berhadapan dengan golongan syaithan (*hizbussyaitan*).

Pandangan radikal yang mendasari pergerakan ISIS di Iraq dan Siria memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif yang memiliki visi pembentukan “negara Islam” (*Daulah Islâmiyah*) dan mewujudkan penerapan syari’ah Islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara. Mereka menganut faham “salafisme radikal”, yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf (generasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya) dengan cara-cara keras dan radikal. Ideologi gerakan yang demikian radikal tersebut muncul di Timur Tengah, terutama Mesir dan lebih spesifik dari Gerakan Ikhwân al-Muslimîn, yang salah seorang ideologinya adalah Sayyid Quṭb. Bagi mereka, Islam pada masa kaum salaf inilah yang merupakan Islam paling sempurna, masih murni dan bersih dari berbagai tambahan (*bid’ah*) yang dipandang “mengotori Islam”.

Gerakan radikalisme Islam global agaknya menghendaki adanya perubahan mendasar terhadap sistem yang ada saat ini (yang mereka sebut sistem sekuler atau “jahiliyah modern”) dan kemudian berupaya menggantinya dengan sistem baru yang mereka anggap sebagai sistem Islam (*Nizhâm al-Islâmî*).² Corak konfrontatif tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap Barat yang hegemonik, dan

² Sistem Islam atau (*Nizhâm al-Islâmî*) yang dimaksud adalah tata pemerintahan yang menegakkan syari’ah Islam, sebagaimana telah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad saw dan Khulafâ ar-Râsyidîn.

terlalu dalam ikut campur di negara-negara Islam, seperti yang terjadi di Irak, Libya, Bosnia, Ukraina, Somalia dan Palestina, serta negara-negara yang berpenduduk Muslim mayoritas. Sayyid Qutb melihat umat Islam sudah lama diperlakukan tidak adil oleh Barat secara politik, ekonomi dan budaya, sehingga ia harus mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat. Dominasi Barat terhadap negara-negara Islam tidak dalam kapasitasnya yang saling bekerjasama, tetapi malah memojokkan dan memusuhi. Dominasi demikian inilah agaknya yang menimbulkan kebencian Sayyid Qutb dan para aktivis Islam radikal terhadap Amerika Serikat, Yahudi dan Barat secara umum.

Sejatinya radikalisme keagamaan merupakan fenomena yang biasa muncul dalam agama apa saja. Jika dicermati secara seksama, pemikiran dan praktik kaum Yahudi dan Kristen Liberal, mereka sama-sama memandang agama mereka sebagai “agama sejarah”, agama yang “evolitif”, agama yang senantiasa berkembang mengikuti zaman dan tempat, menurut mereka di luar Gereja tidak ada keselamatan (*extra ecclesiam nulla salus*). Pada sisi lain, Kaum Yahudi bertekad bahwa mereka adalah bagian dari sejarah perjalanan dari dinamika agama Yahudi.³ Oleh sebab itu, maka radikalisme sangat berkaitan erat dengan fundamentalisme, yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme adalah semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu.⁴ Biasanya fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama tadi dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat.

Vonis Barat yang bersifat tuduhan tanpa argumentasi historis dan epistemologi sosiologis yang memadai mengatakan bahwa gerakan radikal adalah gerakan Islam fundamental yang

³ Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama*, (Jakarta : Hujjah Press, 2007), h. xviii-xix.

⁴ Berseberangan dengan pandangan Barat, fundamentalisme pada dasarnya sebuah gerakan Protestan yang tumbuh di Amerika dan muncul pada abad 19 Masehi dari kalangan gerakan yang lebih luas yaitu Messianik yang meyakini kembalinya Kristus secara fisik ke dunia sekali lagi untuk memerintah dunia selama seribu tahun yang mendahului hari pembalasan dan perhitungan. Lihat, Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, (Jakarta : Robbani Press, 1998), h. 68.

berwujud terorisme dan oleh karena itu harus ditumpas habis. Justru kesimpulan yang serampangan inilah yang menjadi teror bagi dunia Islam. Fundamentalisme secara serampangan dipahami sebagai bagian substansi ajaran Islam. Sementara fenomena politik dan ideologi terabaikan. Memahami Islam merupakan aktivitas kesadaran yang meliputi konteks sejarah, sosial dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalisme Islam. Tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pikiran manusia. Nyatanya, Islam tidak pernah menawarkan kekerasan atau radikalisme. Persoalan radikalisme selama ini hanyalah permaianan kekuasaan yang mengental dalam fanatisme akut. Dalam sejarahnya, radikalisme lahir dari persilangan sosial dan politik.⁵

Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini ingin menyoroti bagaimana gerakan radikalisme Negara atau penguasa dalam perspektif politik global serta bagaimana cara membendung arus radikalisme politik global tersebut. Selanjutnya, akan coba diurai bagaimana radikalisme dalam hal persaingan politik Islam dan Barat, utamanya bagaimana kedua kutub ekstrim tersebut menyoroti tentang makna demokrasi.

B. Radikalisme Negara Perspektif Politik Global

Ketika orang berbicara masalah radikalisme, maka pertama yang tergambar adalah persoalan tersebut masuk dalam domain politik, yaitu bagaimana sesungguhnya radikalisme yang terjadi merupakan bentuk radikalisme negara yang dilakukan oleh perangkat kekuasaan yang ada terhadap warga negaranya, atau tindak radikalisme yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik diterjemahkan sebagai adanya pihak lain yang campur tangan dalam fenomena radikalisme yang terjadi. Pemahaman ini kiranya tidaklah berlebihan, dan tidak salah, sebab memang dalam realitas empiriknya memperlihatkan kondisi yang tidak jauh berbeda dari pendapat atau asumsi tersebut.

Tidak jauh berbedanya antara pendapat atau asumsi di atas,

⁵Lihat, M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2008).

dengan membawa persoalan radikalisme dalam domain politik karena hanya politiklah, oleh para ahli dan teoritikus politik, dinilai satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara terbuka dan juga secara eksplisit kasat mata mengembangkan berbagai teori, dan pandangan tentang bagaimana radikalisme sebagai sarana yang inheren dan sah dipergunakan guna merebut dan mempertahankan kekuasaan yang ada, terutama teori politik yang dikembangkan pada abad pertengahan, serta teori politik Marxian dan Sosialis.⁶

Membicarakan radikalisme tentu tidak bisa mengucilkan persoalan dari keberkelindan antara negara dan penguasa, karena menurut Hegel, kupasan tentang negara dan penguasa merupakan elemen utama dalam ilmu politik.⁷ Oleh karena itu, tidak terlalu “lebai” berbicara masalah radikalisme dalam perspektif politik, maka biasanya dengan serta merta orang akan terlintas kepada radikalisme yang dilakukan oleh negara, atau radikalisme yang dilakukan oleh aktor lain selain negara yang memiliki kekuasaan (*power*) yang luar biasa besarnya, sehingga radikalisme tidak saja diolah oleh kaum teroris muslim, tetapi orang akan merujuk pada negara adikuasa Amerika Serikat, Yahudi dan aktor-aktor politik yang bermain, seperti presiden AS atau perdana menteri Israel.

Berbicara mengenai sumber radikalisme, maka sebahagian para ahli menuding bahwa kekuasaanlah yang menjadi akarnya, baik yang direpresentasikan oleh negara maupun penguasanya. Mengapa Amerika Serikat begitu kuat melakukan radikalisasi atas radikalisme, sebagai contoh rekayasa politiknya menuding bahwa terorisme itu berbahaya bagi keamanan dan perdamaian, oleh karena itu harus dihancurkan, maka ia sesungguhnya sudah melampaui perilaku teroris yang dia tuduhkan. Maka dapat ditegaskan kekuasaannya atas PBB-lah yang menjadi musabab radikalisme Amerika, Yahudi dan Barat itu. Hal ini dikarenakan, kekuasaan sebagai suatu konsep memberikan kepada orang untuk mewujudkan segala keinginan, dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif politik, radikalisme yang terjadi

⁶Konfirmasi lebih jauh, Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisa Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, (Jakarta : UI Press, 1986).

⁷ Gafna Raiza Wahyudi dkk (Penerjemah), *Antonio Gramsci: Catatan-Catatan Politik*, (Surabaya : Penerbit Pustaka Prometheus, 2001).h. 29.

menempatkan faktor kekuasaan sebagai inti persoalannya, sehingga radikalisme juga sering dimaknai sebagai bentuk dan cara perebutan kekuasaan.⁸

Jika diperhatikan lebih jauh perilaku politik adikuasa Amerika Serikat, Yahudi dan sekutu-sekutunya agaknya tidak berlebihan kalau Machiavelli berpendapat bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara yang dispotik berkohefif menyatu dengan kepura-puraan, kemunafikan, kelicikan, kejahatan, penghianatan, demi kepentingan negara, yang penyelenggaraannya tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai etis, kultural, dan religius.⁹ Hal demikian ini, agaknya telah membelakangi warisan keagamaan Amerika Serikat yang mana pada abad-18 terkenal selogannya adalah bahwa agama merupakan suatu faktor penting yang menyatu dengan peristiwa-peristiwa politik.¹⁰ Di sinilah letak kemunafikan yang ditampakkan dengan dan atas nama negara dan kekuasaan politik yang bertolak belakang dengan nilai-nilai rigius, terlepas dari agama apapun yang mereka anut.

Dewasa ini, apakah orang itu taat beragama ataupun sekuler, ketika ia memegang kekuasaan cenderung mengikuti pandangan Machiavelli yang mengatakan bahwa salah satu aspek kunci dari kekuasaan adalah radikalisme. Para penguasa politik yang enggan menggunakan radikalisme tidak akan pernah memperoleh kekuasaan, atau akan kehilangan kekuasaan yang pernah diraihnya.¹¹ Namun, penggunaan radikalisme yang berlebihan akan menimbulkan kebencian pada rakyat dan mungkin

⁸ Henk Schulte Nordholt, *Geneologi Radikalisme*, Dalam Jurnal Demokrasi Dan Ham, Aksi Radikalisme Dan Kekuasaan Vol. 2 Nol 1, Februari-Mei 2002, (Jakarta: Penerbit The Habibie Centre 2002), h. 81. Sedangkan menurut JRP French & Bertram Reven dalam bukunya *The Basic of Social Power* mengatakan bahwa perbutan kekuasaan dengan menggunakan radikalisme diklasifikasinya sebagai "coercive power" yang selalu diluar konstitusional yang lazim disebut coup d'etat. Lihat JRP French & Bertram Reven dalam Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta 1999), h. 19.

⁹ J.H. Rappaport, *Filsafat Politik: Plato Aristoteles Agustinus Machiavelli*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Edisi I Cet-2, 2003), h. 432.

¹⁰ George M. Marsden, *Agama dan Budaya Amerika*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 45.

¹¹ Machiavelli membenarkan untuk menggunakan kekerasan jika mengharuskan. Lihat Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik Jajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 256.

akan digulingkan. Oleh karena itu, bagi Machiavelli lebih menyukai pemerintahan berbentuk republik sebagai sebuah rezim yang non-monarkhis. Hal ini dikarenakan, republik merupakan sistem pemerintahan yang didasari pada kesepakatan antara rakyat dengan penguasa, kesepakatan ini akan memperkuat kedudukan para penguasa, sehingga membatasi dilakukannya radikalisme.¹²

Sejalan dengan pemikiran Machiavelli di atas, Thomas Hobbes mencoba mengkonstruksi kemunculan suatu negara, sebagai bentuk kesepakatan para anggota masyarakat, yang sebelum terbentuknya negara (*state of nature*), manusia hidup dalam pertempuran semua lawan semua. Pada waktu manusia hidup tanpa suatu kekuasaan umum untuk menjaga mereka semua dalam keadaan takut, mereka dalam kondisi yang dinamakan perang, dan dalam perang seperti itu setiap orang menentang setiap orang. Dalam kondisi tersebut, radikalisme dan penipuan merupakan cara yang utama dalam mempertahankan kehidupan.¹³ Poinnya di sini, bahwa tindakan radikalisme niretika/ moral agama dilakukan dalam rangka mempertahankan diri, hak-hak hidup dan kepentingan masing-masing atas nama pribadi dan kelompok, dengan adanya negara sebagai organisasi kelompok tersebut, maka radikalisme bergeser diorganisir dan dilakukan oleh negara atau pemimpinnya/penguasa.¹⁴

Pandangan kedua filosof kenegaraan tersebut ada sedikit perbedaan secara prinsipil, jika Machiavelli berpendapat, bahwa radikalisme menjadi sarana utama dalam melaksanakan pemerintahan, maka Thomas Hobbes berargumen bahwa negara harus mendasarkan pada hukum, sehingga sekilas Thomas Hobbes tampak meletakkan hukum sebagai dasar dalam suatu negara, agaknya alasan ini dipoles sedikit oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk dapat melakukan radikalisme terhadap dunia Islam dengan menuduh bahwa mereka melakukan teror dan mengancam perdamaian dunia, maka di sini ada delik hukum untuk membunuh hanguskan negara-

¹² Charles F. Andrain (Luqman Hakim-Penerjemah), *Politik dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit PT. Tiara Wacana, Cet. 1 1992), h. 128.

¹³ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama , 1992), h. 111.

¹⁴ Lihat, Henry J. Schmandt, *Filsafat*, h. 306.

negara Islam yang kuat dan militansinya tidak diragukan, sehingga diperlukan sekutu-sekutu dalam merealisasikan ambisi kekuasaan atas negara lain.

Meskipun Thomas Hobbes tetap berpikiran, bahwa demi tetap berdiri, dan tegaknya negara, penegakan hukum positif perlu diberlakukan, namun pengangungan pemikiran Thomas Hobbes yang seolah meletakkan kerangka hukum sebagai segala-galanya, pada akhirnya harus terjebak pada cara-cara yang ditawarkan oleh Machiavelli dalam menegakkan hukum itu sendiri, yaitu radikalisme. Berbeda lagi dengan konsep Johan Galtung yang mengkaitkan persoalan radikalisme dengan hak seseorang, terutama dalam hal ini hak untuk turut serta dalam politik, sehingga pengertian radikalisme menurut Johan Galtung adalah “*any avoidable impediment to self-realization*”.¹⁵ Jadi esensi radikalisme adalah terhalangnya seseorang untuk mengaktualisasikan potensi diri (terutama menyangkut hak yang ada pada individu maupun kelompok) secara wajar. Karena radikalisme dalam konsep ini bersifat temporal, maka dapat ditegaskan bahwa radikalisme itu sesungguhnya bukanlah sifat hakekat dari manusia.

Simplikasi atas pemikiran tersebut dapat ditegaskan bahwa jenis radikalisme ada tiga bentuk, yaitu radikalisme kultural, radikalisme struktural, dan radikalisme langsung. Radikalisme kultural merupakan radikalisme yang melegitimasi terjadinya radikalisme struktural dan radikalisme langsung. Radikalisme langsung (*violence-as-action*) sendiri dimaknai sebagai radikalisme yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian-kejadian atau perbuatan, sehingga mudah dilakukan identifikasi terhadap jenis radikalisme ini, sedangkan radikalisme struktural (*violence-as-structure*) diartikan sebagai radikalisme yang berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran, serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Pada akhirnya dapat ditegaskan bahwa radikalisme dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam kondisi apapun, apakah negara, masyarakat, kelompok tertentu, atau bahkan individu dapat menjadi pelaku radikalisme.

¹⁵ Johan Galtung, *The True World: A Transnational Perspectives*, (New York : The Free Press, 1980), h. 67.

Namun, negara tetap dilihat oleh Johan Galtung sebagai pihak yang memiliki potensi besar untuk menghilangkan hak warga negaranya guna merealisasikan diri dalam bidang politik.

Sesungguhnya pelaku radikalisme tidak hanya negara terhadap warga negaranya, atau negara terhadap warga negara lain atau berhadapan-hadapan antara negara dengan negara lain, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap regim yang berkuasa. Radikalisme jenis ini biasa dikenal dengan radikalisme politik yaitu radikalisme masyarakat sipil yang dilakukan berdasarkan isu-isu politik, terutama yang terkait dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan di dalam organisasi politik.¹⁶ Sebagaimana dituturkan oleh Ted Robert Gurr, bahwa “*all collective attacks within a political community against the political regime, its actors-including competing political groups as well as incumbents-or its policies. The concept represent a set of event, a common property of which is the actual or threatened use of violence...the concept subsumes revolution...geurilla war, coups d’etat and riots*”.¹⁷ Jadi, radikalisme dapat juga ditujukan pada pemerintah, atau organisasi-organisasi politik yang bisa berbentuk revolusi, perang gerilya, ataupun kudeta.

Lebih jauh, Gurr mengatakan bahwa radikalisme politik yang terjadi berawal dari psikologi manusia yang mengalami kekecewaan yang muncul sebagai akibat adanya ketidaksesuaian antara harapan akan barang atau kondisi hidup yang mereka yakini sebagai hak (*value expectation*), dengan barang atau kondisi yang mungkin mereka peroleh, atau kemampuan sistem untuk memungkinkan orang memperoleh barang-barang, dan kondisi yang mereka inginkan tersebut (*value capability*) yang menyebabkan munculnya kekecewaan pada manusia, dan dalam perspektif politik kekecewaan ini muncul ketika mereka yang memiliki kekuasaan (negara, kapital atau pemilik modal, birokrasi, partai politik dan lain-lain) tidak mampu mewujudkan segala macam kebutuhan, atau janji mereka terhadap kelompok tertentu yang masuk dalam lingkup kekuasaannya.¹⁸

¹⁶ James Rule, *Theories of Civil Violence*, (Berkeley: Berkeley University Press, 1988), h. 170-171.

¹⁷ Lihat Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1950), h. 2-4.

¹⁸ *Ibid.*

Agaknya sering terjadi demonstrasi di sebuah negara dengan berbagai tuntutan, ternyata tidak mendapat respon positif dari rezim penguasa akhirnya berujung pada perilaku radikalisme yang anarkis. Radikalisme yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat sebagai kelas yang dinilai tertindas serta dilandasi oleh rasa kecewa rakyatnya terhadap negara meluas, dalam teori politik Marxian dan Sosialis dikenal dengan istilah revolusi sosial, suatu bentuk transformasi yang berlangsung cepat pada superstruktur yuridis dan politis masyarakat, serta dinilai sebagai salah satu cara yang dianggap sah dalam upaya memperjuangkan hak masyarakat tersebut.¹⁹

C. Membendung Arus Radikalisme Politik Global

Arus radikalisme politik global sangat deras dan cukup membahayakan kemakmuran dan kedamaian dunia. Oleh sebab itu, secara teoritis muncul beberapa analisis yang menawarkan upaya membendung arus deras radikalisme politik global yang mengerikan itu. Mark R. Woodward menyarankan agar menutup akses terhadap media massa seperti internet, surat kabar ataupun media lain yang dicurigai berbau radikal, atau paling tidak, dapat menyulut radikalisme global di berbagai belahan dunia ini. Pendapatnya ini kemudian dipatahkannya sendiri dengan mengatakan bahwa langkah tersebut bukanlah cara yang benar, sebab informasi tidak akan bisa di bendung. Kemudian ia lebih lanjut menawarkan dua cara yang bisa dilakukan untuk membendung arus deras pengaruh globalisasi politik dan radikalisme Islam.

Bagi Mark R. Woodward, agaknya pendidikan agama merupakan akar dalam membangun revolusi sosial dalam membendung radikalisme politik global. Mayoritas anggota dari kelompok Islam aliran garis keras adalah pemuda (usia 15 – 25 tahun) yang kebanyakan belum tahu banyak tentang agama. Apabila tingkat pendidikan agama tinggi maka akan tahu dan sadar mana yang benar dan yang salah, tidak akan mudah terpengaruh dengan aliran yang belum jelas kebenarannya. Lembaga-lembaga pendidikan

¹⁹ Lihat C. Wright Mills (Imam Muttaqien-Penerjemah), *Kaum Marxis: Ide-Ide Dasar dan Sejarah Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Cet I, 2003). Baca juga, Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisa Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Islam bukanlah central radikalisme, kebanyakan kelompok radikal muncul dari lulusan universitas sekuler.

Pengakuan Mark R. Woodward ini ditunjukkan oleh bukti bahwa di Amerika Serikat, justru agama tidak diberi tempat dalam pendidikan, kecuali mungkin dalam upacara-upacara resmi atau dalam organisasi kampus swasta bahkan keharusan berdo'a dan membaca al-Kitab pun dihapuskan.²⁰ Artinya bahwa politik nir-agama (sekuler)lah yang memicu perilaku negara atau penguasa melakukan tindakan radikalisme untuk memenuhi hasrat berkuasa. Oleh karena itu harus ada revolusi sosial di antaranya adalah dimulai melalui institusi pendidikan.²¹

Meskipun tidak bulat, para teoritikus politik sepakat bahwa dalam perspektif politik, agama merupakan suatu sistem politik (*a political system*). Demikian Islam misalnya oleh V. Fitzgerald bukan hanya semata-mata agama (*religion*), namun juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh pemikiran Islam dibangun di atas fondasi bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²² Tokoh Ikhwanul Muslimin Hassan Albanna menegaskan bahwa belum sempurna iman seseorang jika tidak melibatkan diri dalam politik. Bahkan hijrahnya Rasulullah saw merupakan peristiwa politik paling awal, sampai membentuk komunitas sebelum kemudian menjadi negara Islam pertama.

Sikap politik sekularistik yang mana tindakan radikalisme politik global hanya sebagai *lip service* belaka yang hanya bersifat pencitraan, tidak sejalan antara ucapan dan tindakannya. Karena pandangan politik Amerika dan Barat itu jelas sekali menolak

²⁰ Paparan sekularisasi pendidikan di Amerika ini lihat lebih jauh pada George M. Marsden, *Agama dan Budaya Amerika*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 381-382.

²¹ Tentang bagaimana revolusi sosial dalam masyarakat sosialis digunakan sebagai sarana penghapusan dari tindakan sang penguasa, lebih jauh konfirmasi pada C. Wright Mills (Imam Muttaqien-Penerjemah), *Kaum Marxis: Ide-Ide Dasar dan Sejarah Perkembangannya*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar Cet I, 2003).

²² Lihat V. Fitzgerald, "The Mohammeden Law" dalam M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Penerbit Gema Insani, 2001), h. 5.

gagasan tentang petunjuk politik dari pemuka agama, sejalan dengan prinsip pemisahan gereja-negara.²³ yang belakangan dipahami sebagai paham sekularisme. Infiltrasi sekularisme ke dalam lembaga-lembaga hukum dan pendidikan tidak dapat dicegah dan semakin memantapkan posisinya di dunia Islam, sehingga umat Islam terbelah antara pro dan kontra. Padahal, prinsip-prinsip Islam menentang sekularisme.²⁴

Berikutnya, Woodward menengarai bahwa untuk membendung arus radikalisme politik global adalah dengan menumbuhkan semangat keterbukaan. Hal ini sangatlah penting, dengan adanya dialog dengan kelompok lain maka eksklusifitas akan semakin hilang. Masalah yang ada bisa terselesaikan melalui dialog, bukan penyelesaian melalui cara-cara radikal atau kekerasan. Apa pun alasan dan latar belakangnya membunuh sesama manusia merupakan hal yang dikutuk oleh agama. Maka jika ada seorang "teroris" yang berpandangan bahwa "menjadi pengantin bom" merupakan jalan pintas menuju sorga, itu adalah ajaran yang sesat. Doktrin politik yang tidak berdasar.

Betapa konsepsi Islam tentang kemanusiaan begitu agung dan mulia. Maka jika ajaran Islam diamalkan dengan benar, kehidupan di muka bumi akan damai dan tentram, karena Islam itu merupakan rahmat bagi sekalian alam. Terorisme dalam arti tindakan kekerasan, perang dan pemboman dengan mengakibatkan tragedi kemanusiaan, seperti kasus di menara kembar Amerika Serikat, Bom Bali I dan II, bom JW Mariot I dan II dan bom Ritz Carlton, yang kesemuanya telah merenggut ratusan bahkan ribuan nyawa orang-orang yang tidak berdosa; ini jelas-jelas tidak benar kalau bersumber dari ajaran Islam.

Nilai-nilai ajaran Islam diberi makna universal, yaitu iman dan keadilan sehingga tindakan sosial dan politiknya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tidak relevan mendikhotomi, atas dasar kebencian, ini golongan kami dan ini golongan mereka. Ini orang Barat dan yang ini orang Timur

²³David C. Leege, Lyman A. Lellstedt, *Agama dalam Politik Amerika*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 197.

²⁴Terkait dengan persoalan ini lihat, Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus barat*, (Jakarta : Robbani Press, 1998), h. 51-54.

karenanya harus diperangi, harus dibom disebabkan beda akidah, dan sebagainya. Namun demikian, menurut Korn & McCorkle kejahatan bukan hanya normal tetapi tidak bisa dielakkan (*crime is not only normal but inevitable*), sebagai konsekuensi dari kompleksitas sosial dan kebebasan individual, sehingga menurutnya kejahatan merupakan harga yang harus dibayar dari sebuah kebebasan (*crime is an inevitable consequence of social complexity and individual freedom. It is one of the price paid for freedom*).²⁵ Jadi kompleksitas dalam diri manusia yang sulit sekali mencapai derajat taqwa akan lebih didominasi oleh syahwat politik yang berujung pada kekerasan.

Nilai kemanusiaan tercermin dalam nilai takwa seseorang yang dapat diperoleh jika dapat mewujudkan sikap toleran, saling menghargai antar sesama manusia. Tidak dibenarkan saling mencemooh, apa lagi diiringi dengan sikap sombong dan membanggakan ras, suku atau golongan. Semua jenis apa pun dan kelebihan apa pun yang dianugerahkan Tuhan padanya, tetap memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan, dan oleh karenanya sesama manusia yang merupakan sama-sama makhluk Tuhan harus menjaga solidaritas kemanusiaan, dan tidak dibenarkan saling berperang dan saling men"teror" satu sama lainnya. Tetapi sikap ini harus berimbang, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi Amerika dan Barat justru memakai standar ganda, hal ini tidak adil dan memicu radikalisme semakin tumbuh dan berkembang, yang melibatkan agama, meminjam istilah Sayyid Qutb, Islam versus kafir²⁶. Dengan demikian kesulitan utama mewujudkan dialog untuk mempertemukan kepentingan di antara dua kutub berbeda.

D. Radikalisme Persaingan Politik Islam dan Barat

Geger perdebatan dan membangkitkan emosi dan selalu menghangatkan suasana diskusi adalah disebabkan kemunculan

²⁵ Lebih jauh lihat Richard R. Korn & Llyod W. McCorkle, dalam J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), h. 10. Baca juga, Paul B. Horton, etc. *The Sociology of Social Problem*, (New Jersey, Prentice Hall: Engglewood Cliefs, 1991), h. 208.

²⁶ Gerald O. Barney mencatat tidak kurang 48 kasus radikalisme yang ada dibelahan dunia ini yang melibatkan agama di dalamnya. Lebih lanjut lihat Gerald O. Barney, et. al, *Global 2000 Revisited: What Shall We Do?: The Critical Issues of the 21th Century*, (Virginia: Millennium Institute, 1993), h. 81.

salah satu karya yang cukup terkenal dalam melihat persoalan ini yaitu karya Samuel Huntington tentang “*Clash of Civilizations*”. Bagi Huntington konflik (baca : radikalisme) pada era ini tidak lagi bernuansa persaingan politik Timur-Barat, tetapi lebih disebabkan perbedaan-perbedaan dan rivalitas ideologis, terutama dalam hal ini, ia melihat Islam memiliki potensi untuk berbenturan langsung dengan Barat. Pandangan, penilaian sampai pada tesis Huntington tentang Islam sebagai suatu ideologi yang membahayakan bagi peradaban dunia.²⁷

Reaksi keras atas tesis Huntington ini berdatangan dari dunia Islam. Indonesia misalnya dari suatu penelitian yang dilakukan oleh Freedom Institute dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pernah mengadakan suatu penelitian yang memperlihatkan hasil bahwa ada korelasi positif antara tesis Huntington dengan rasa kekecewaan masyarakat terhadap Amerika dengan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk demonstrasi anti Amerika yang pada dasarnya adalah demonstrasi atas penolakan tesis Huntington tersebut.²⁸ Dalam kaitannya dengan persoalan global, Beverley Crawford berpendapat bahwa politisasi agama dalam kancah kekerasan yang sifatnya terbuka terjadi dikarenakan melemahnya institusi politik sebagai akibat berbagai tekanan, terutama liberalisasi dan integrasi global.²⁹ Dalam perspektif hegemoni kekuasaan, Umar Kayam seorang Guru Besar Sastra dan Sosiologi dari UGM berpendapat bahwa perang salib sebagai salah satu perang terbesar yang mengatasmakan agama, dinilainya merupakan bentuk perang hegemoni kekuasaan atas ekonomi.³⁰

Kekerasan, keganasan, kebengisan ataupun teror (*violent*) dalam politik berakar dari ideologi yang juga keras. Ideologi keras

²⁷ Lihat M. Natsir Tamara Dan Elza Taher Peldi Taher (editor), *Agama Dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996), h. 3-33. Lihat juga Saiful Muzani, Jajat Burhanudin dkk, *Benturan Peradaban, Sikap dan Prilaku Islam Indonesia Terhadap Amerika*, (Jakarta: Penerbit Nalar, 2005).

²⁸ Lihat *Harian Kompas*, Sabtu, 17 Desember 2006.

²⁹ Lebih jauh lihat Beverly Crawford, “Politik Identitas: Sebuah Pendekatan Kelembagaan”, dalam *Jurnal Gerbang*, (Nomor 10, Vol. IV, Juni –Agustus 2001), h. 103.

³⁰ Lihat Eny Effendi (Editor), *Islam dan Dialog Budaya*, (Jakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama Puspa Swara Dengan Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan Ulumul Qur’an., Cet-1, 1994), h. 166.

ini ditandai dengan pengabaian terhadap nilai-nilai toleransi, karena menganggap dirinyalah yang paling benar. Jika belakangan ini Amerika dan sekutunya (Barat) mengidentikkan kelompok teroris dengan kaum Muslim, tentu saja hal ini merupakan tuduhan yang sangat keliru. Sebagaimana telah dipaparkan, bahwa Islam membawa ajaran yang santun dan lemah lembut, tidak pernah mentolerir sikap dan perbuatan yang menjurus pada kekerasan. Jika terjadi teror yang dilakukan oleh oknum Muslim, maka perlu dilihat terlebih dahulu latar belakang dan ideologi yang ia anut secara komprehensif.

Kerangka dasar negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa sistem politik Indonesia adalah sistem yang berdasarkan Pancasila dan UUD-1945, sudah final. Adanya partai-partai fundamentalis keagamaan yang mementingkan simbol-simbol dan label-label khas seperti sebutan “negara Islam” atau Islam sebagai dasar/falsafah negara, memunculkan sebuah fenomena yang kontra produktif dengan program-program politik yang berhubungan dasar negara, demokrasi, struktur pemerintahan dan undang-undang.

Dasar negara yang diinginkan oleh kaum fundamentalis adalah al-Qur’ân dan Sunnah. Mereka berangkat dari keyakinan bahwa ajaran Islam bersifat perfektif. Oleh karenanya soal-soal keduniawian, seperti politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, konsep-konsep dasarnya sudah ada dalam kedua narasumber tersebut. Maka dasar negara yang ideal dan memiliki kebenaran mutlak adalah al-Qur’ân dan Sunnah. Ideologi inilah yang kerap kali muncul ketika sistem demokrasi tidak dapat memenuhi hajat kepentingan rakyat dalam pemerintahan, seperti adanya monopoli, pelanggaran HAM dan kasus-kasus korupsi yang tidak ditindak dengan hukum yang tegas, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Terma “radikal” dalam Islam tidak bisa menghindari dari pandangan bahwa Islam merupakan sebuah ajaran yang bersifat *holistik perfectly*, tidak saja sebagai ajaran keberagaman melainkan sebagai sebuah sistem kehidupan (*way of life*). Agaknya hal inilah yang menjadi kata kunci dalam kedalaman konsistensi dan mendorong aksi gerakan yang memadukan antara modernitas dan budaya

dalam Islam.³¹ Sehingga para aktivis pergerakan Islam memaksakan nilai-nilai Islam secara tekstual dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berseberangan dengan diskursus di atas, muncul para aktivis pengusung ide sekularisme, pluralisme dan liberalisme agama, yang mungkin tepat jika dikatakan sebagai bersumber dari Barat. Diskursus perdamaian menunjukkan signifikansinya bila manusia mau menyadari bahwa eksistensi kemanusiaannya itu tidak mungkin terjadi jika ia hidup sendirian. Perdamaian merupakan suatu keniscayaan dalam komunitas masyarakat majemuk. Eksistensi manusia tidak bisa dipisahkan dari komunitas, baik komunitas sosial, politik, budaya maupun agama tertentu. Oleh karena itu, selalu relevan memperbincangkan hubungan politik dengan agama, serta kontribusinya bagi perdamaian dunia guna menepati penghargaan Sang Pencipta bahwa manusia diciptakan-Nya sebagai sebaik-baiknya ciptaan dan mampu mewujudkan sebuah peradaban yang tinggi. Di sini jelas kontribusi agama dalam mewujudkan politik perdamaian adalah dengan melaksanakan amal saleh, transparansi dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.³²

E. Demokrasi Penyulut atau Peredam Radikalisme Global

Radikalisme global jelas menjadi pemusnah pertumbuhan kehidupan demokrasi antar bangsa-bangsa di dunia. Akan tetapi seringkali demokrasi dikambinghitamkan dalam kerangka politik pengejawantahan praktik radikalisme yang penuh intrik kepentingan politik global. Pertentangan perdebatan terhadap konsep demokrasi antara Islam dan Barat cukup tajam. Jika demokrasi dipahami secara proporsional sebagai pemanusiaan manusia di mana manusia merupakan khalilullah dan berkewajiban menyebar perdamaian demi pemakmuran bumi, maka tidak ada kendala dan masalah dengan Islam, karena memang senafas dengan definisi tersebut.

³¹ Syafiq Mughni (Editor.), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*, (Montreal, Quebec, Canada: Canadian International Development Agency, t.th), h. 450.

³² Antara lain disebutkan dalam al-Qur'an surat *at-Tin*, ayat 4 dan 6 "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya". orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya".

Namun demikian, jika proporsi demokrasi berlebihan yang telah meniscayakan manusia sebagai adiluhung, menafikan kekuasaan transendental yang dimiliki oleh Tuhan, maka demokrasinya akan mendiskreditkan manusia lain, bangsa yang satu menafikan bangsa yang lain bahkan negara satu sebagai adikuasa menggap negara lain sebagai sapi perahan yang dinikmati susunya. Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi, radikalisme juga dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah, dalam hal ini ia mengatakan bahwa meskipun pemberontakan tidak dia dibenarkan, tetapi seandainya masyarakat memberontak, pemerintah harus toleran terhadap pemberontakan dan tidak membunuh atau menghukum berat mereka. Karena dalam keadaan bagaimanapun, muslim tidak boleh membunuh muslim lain, begitu pula pemerintah tidak boleh menghukum secara kejam masyarakat muslim.

Bagi orang yang memberontak, Ia bukan melawan pemerintah tetapi melawan negara atau penguasa yang zalim.³³ Saat ini gerakan radikalisme yang diberi label terorisme oleh Barat telah berhasil membuat sesama muslim saling membunuh, antara rakyat dan penguasa saling memerangi. Masyarakat disebut sebagai pemberontak dan teroris oleh sebab itu harus ditumpas dan dibunuh. Sungguh suatu pemandangan yang tragis dan menjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan karena kebodohan berhadapan dengan politik global Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya.

Misi perdamaian dapat terwujud jika dalam suatu komunitas menjunjung tinggi etika dan moralitas yang diejawantahkan dalam demokrasi yang proporsional yang tidak mengabaikan etika dan moralitas dengan tidak melihat kasta, etnis, bangsa tertentu. Semua sama di hadapan Sang Pencipta dan oleh karena itu tidak boleh saling membunuh dengan alasan demokrasi atau memberantas terorisme dan radikalisme, dengan pendekatan kultural, mengetuk dan sekedar mengetuk hati orang, siapa tahu mereka bersedia turut memenuhi panggilan kebenaran Tuhan. Dengan sikap moderat seperti ini, tampilan Islam akan lebih menawan dan menebar

³³ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam Studi tentang Fundamentalisme Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 228.

perdamaian.³⁴ Tidak dengan cara kekerasan atau pemaksaan. Apalagi dengan melakukan kekerasan untuk tujuan formalisme agama dalam negara, yang dalam catatan sejarah selalu menemui kegagalan.

Pemikiran politik yang berbasis pada paradigma integralistik mendorong bangkitnya paradigma dwipolar dengan terminologi *Dār al-harb* dan *dār al-Islām*, mendatangkan akibat yang sangat dahsyat, baik segi positif maupun segi negatifnya. Di kalangan umat Islam di mana saja terdapat perasaan tidak senang tertentu terhadap non Muslim, oleh berbagai alasan dan latar belakang. Namun di Barat dikenal sebagai “anti Semitisme” yang sempat memuncak menjadi *Genocide* dan *Holocaust* oleh Nazi Jerman, perasaan kurang positif Muslim terhadap non Muslim tidak ada artinya. Bahkan masih dalam batas-batas yang wajar dan manusiawi, seperti halnya setiap perasaan yang ada pada suatu kelompok terhadap kelompok lain.

Prasangka dan stereotip negatif adalah bagian dari kenyataan hubungan antar kelompok. Namun tidak semua kelompok membenarkan adanya prasangka dan stereotip kepada kelompok lainnya, dan banyak dari mereka, setidaknya yang membangun visi politiknya dengan dasar paradigma simbiosis atau kaum substansialis, yang berkomitmen untuk memberantasnya.³⁵ Kaum Muslim, dalam hubungannya dengan agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Kristen, dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berkomitmen untuk memberantas stereotip negatif.

Peradaban manusia yang tinggi dapat terwujud dalam kehidupan politik yang demokratis. KH. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa di mana-mana gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi.³⁶ Artinya semua agama sesungguhnya mengajarkan spirit demokrasi. Sehingga secara

³⁴ Tentang sikap Muslim yang harus lunak ini Muhayya berdalil “*wa alaika bi at-tariqati al-hudā, wa lā yakhāfu bi qillati aṣ-ṣāliḥ*”, hendaknya engkau melakukan sesuatu dengan petunjuk Allah dan tidak perlu khawatir dengan sedikitnya orang-orang yang shalih. Disampaikan dalam Seminar Nasional “Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Perdamaian” di Hotel Brand Naggroce Banda Aceh, Senin 19 Oktober 2009.

³⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. xc.

³⁶ Abdurrahman Wahid, “Agama...”, h. 329.

simplistik Bahtiar Effendi mengatakan bahwa jika dalam suatu negara atau komunitas terjadi kekerasan, maka pertanyaannya adalah apakah agama itu masih fungsional apa tidak ?³⁷ Bagi Gus Dur, eksklusivitas suatu agama atas agama-agama lain merupakan faktor pemicu adanya kekerasan agama, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Dinamika intern agama-agama di dunia menunjukkan benturan keras antara mereka yang ingin melakukan transformasi kehidupan masyarakat dari titik tolak keagamaan, dan mereka yang mempertahankan status quo keadaan dengan segala daya upaya.³⁸

Konsep demokrasi sejalan dengan pemikiran pluralisme yang menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul, etnis, agama, jenis kelamin dan bahasa ibu. Sementara agama hanya sebatas saling toleransi, kesepahaman dan hormat-menghormati dalam berlainan agama dalam suatu negara. Dalam bahasa Perbandingan Agama : *agree in disagreement*, setuju dalam perbedaan, yang diturunkan dari konsep *lakum dīnukum wa lī al-dīn*. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak boleh saling mencerca dan saling memperolok-olokkan, dengan demikian akan terwujudlah perdamaian dalam masyarakat atau negara. Realitas kesejarahan memperlihatkan bahwa Nabi saw selalu memerangi para pemimpin disebabkan pembunuhan, penghianatan, atau ketidakadilan yang mereka lakukan, dan Nabi saw tidak pernah memerangi masyarakat hanya karena mereka menolak Islam.³⁹

Sistem penyelenggaraan negara yang demokratis, masih diperdebatkan juga, sebab menurut mereka, konsep demokrasi “ala Barat” tidak diperlukan, bahkan menyesatkan. Demokrasi adalah satu sistem politik dan sosial yang timbul di Barat, yang dikenal oleh peradaban Barat modern dari peradaban Yunani kuno. Islam,

³⁷ Pernyataan Bahtiar ini ia kemukakan dalam Seminar Nasional “Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Perdamaian” pada hari Senin 19 Oktober 2009 di Hotel Grand Naggroe, Banda Aceh.

³⁸ Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi” dalam Elga Sarapung dkk (Tim Ed.), *Spiritual Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2004), h. 331.

³⁹ Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, (Bandung : Penerbit Mizan, 2002), h. 141.

pada dasarnya, dalam masalah-masalah hidup, keorganisasian, sistem dan sarana yang dipakai untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan filsafatnya, tidak selalu menutup begitu pula tidak senantiasa menerima bagi semua yang datang dari luar, tanpa memahami dan melakukan ijtihad.⁴⁰ Namun demikian, karena karakter khas dari aliran pemikiran fundamentalisme adalah menolak interpretasi dan ijtihad, maka mereka menolak sistem politik demokrasi.

Terhadap struktur pemerintahan, jelas kaum fundamentalis bersifat romantis, menurut Leonard Binder, bahwa “fundamentalisme adalah aliran yang bercorak romantis kepada Islam periode awal”.⁴¹ Mereka ingin mengembalikan sistem khilafah pada masa klasik, sebagaimana zaman Rasulullah dan khulafaur-Rasyidin. Atas dasar keyakinan tersebut mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam memperjuangkan cita-cita dan tujuan mereka. Segala yang menghadang implementasi syari’ah, atau apa saja yang bertentangan dengan teks ajaran agama mereka posisikan sebagai ajaran *jahiliyah*. Termasuk trend modern dewasa ini, seperti kebebasan individual, pluralitas keagamaan, suasana sekuler, rasionalisme, revolusi seks, revolusi dalam cara berpakaian, musik pop dan lain-lain.⁴²

F. Penutup

Sebagai wacana penutup dalam kajian ini ada beberapa tawaran solutif guna mengeliminir tindakan radikalisme politik global *pertama*; keniscayaan mengakui adanya perbedaan, karena hal ini adalah hukum alam, sunnatullah, *kedua*; karena konsekuensi dari pluralisme maka paham absolutisme harus ditolak, *ketiga*; semua bentuk pemikiran seperti terorisme, radikalisme, fundamentalisme bahkan demokrasi, semua bersifat nisbi alias relatif, *keempat*; mengakui kesetaraan sebagai suatu konsep kehidupan, karena semua manusia di hadapan Sang Pencipta adalah sama, kecuali tingkat ketakwaannya, *kelima*; oleh karena itu, suka tidak suka harus

⁴⁰ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi, Islam Virsus Barat*, (Jakarta: Rabbani Press, 1998), h. 179.

⁴¹ Leonard Binder, *Religion and Politics in Pakistan*, (Los Angeles: The University of California Press, 1961), h. 71.

⁴² Frans Magnis Suseno SJ, *Fundamentalisme Agama dan Keagamaan Liberal*, Makalah yang disampaikan dalam seminar “Islam Liberal dan Islam Fundamental” FMPS Syarif Hidayatullah, Jakarta, 11 Mei 2002.

mengakui keberadaan yang lain (*the others*) serta *keenam*; terbukanya ruang dialog dan komunikasi.

Ditengarai dalam ulasan sebelumnya bahwa radikalisme global dapat terjadi karena adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Jika tekanan itu melampaui batas ambang kesabaran, maka muncul gerakan perlawanan dengan menggunakan segala cara untuk meraih kemerdekaan. Pandangan dunia (*world view*) dari umat beragama yang berupaya memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap-sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Hal tersebut didukung oleh kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa secara pluralistik sehingga menyebabkan hilangnya rasa toleran, dan sebaliknya timbul fanatisme atas kebenaran agamanya sendiri.

Secara internasional, aksi-aksi radikalisme dapat mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan agama yang dipeluk oleh bangsa tersebut. Penyebabnya tidak lain karena banyak orang yang menyamaratakan antara agama dan praktek-praktek yang dilakukan oleh umat beragama tersebut. Radikalisme yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Palestina dan Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina) dan belakangan di Iraq dan Syiria mengakibatkan daerah-daerah tersebut menjadi ajang tragedi kemanusiaan.[]

Daftar Pustaka

- Andrain, Charles F., *Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Penerbit PT. Tiara Wacana, Cet 1 1992.
- Barney, Gerald O., et. al, *Global 2000 Revisited: What Shall We Do?: The Critical Issues of the 21th Century*, Virginia: Millennium Institute, 1993.
- Binder, Leonard, *Religion and Politics in Pakistan*, Los Angeles : The University of California Press, 1961.
- Crawford, Beverly, "Politik Identitas: Sebuah Pendekatan Kelembagaan", dalam *Jurnal Gerbang*, Nomor 10, Vol. IV, Juni -Agustus 2001.

- Effendi, Eny (Editor), *Islam dan Dialog Budaya*, Jakarta : Diterbitkan Atas Kerjasama Puspa Swara Dengan Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan Ulumul Qur'an., Cet-1, 1994.
- French, JRP. & Reven, Bertram dalam Inu Kencana Syaf'ie, *Ilmu Politik*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta 1999.
- Galtung, Johan, *The True World: A Transnational Perspectives*, New York : The Free Press, 1980.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisa Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Hanafi, Hasan, *Ad-Din wa as-Saurāt fi Miṣr 1952-1986, ad-Din wa at-Tanmiyyāt al-Qaumiyāt*, Kairo : Maktabat Madbūlī, 1989.
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama*, Jakarta : Hujjah Press, 2007.
- Horton, Paul B. etc. *The Sociology of Social Problem*, New Jersey, Prentice Hall: Engglewood Cliefs, 1991.
- Imarah, Muhammad. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Jakarta: Robbani Press, 1998.
- Jurnal Demokrasi Dan Ham, Aksi Radikalisme Dan Kekuasaan Vol. 2 Nol 1, Februari-Mei 2002, Jakarta: Penerbit The Habibie Centre 2002.
- Leege, David C. & Lellstedt, Lyman A., *Agama dalam Politik Amerika*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Marsden, George M., *Agama dan Budaya Amerika*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Mills, C. Writht, *Kaum Marxis: Ide-Ide Dasar dan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar Cet I, 2003.
- Mubarak, M. Zaki, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Mulani, Saiful, Jajat Burhanudin, dkk, *Benturan Peradaban, Sikap dan Prilaku Islam Indonesia Terhadap Amerika*, Jakarta: Penerbit Nalar, 2005.

- Mughni, Syafiq (Editor.), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*, Montreal, Quebec, Canada: Canadian International Development Agency, t.th.
- Rahman, Fazlur, *Gelombang Perubahan dalam Islam Studi tentang Fundamentalisme Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001.
- Raiza Wahyudi, Gafna, dkk (Penerjemah), *Antonio Gramsci: Catatan-Catatan Politik*, Surabaya: Penerbit Pustaka Prometheus, 2001.
- Ramadan, Tariq, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, Bandung : Penerbit Mizan, 2002.
- Rappar, J.H., *Filsafat Politik: Plato Aristoteles Agustinus Machiavelli*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Edisi I Cet-2, Tahun 2003.
- Ritaudin, M. Sidi, *Posisi Syari'ah Islam dalam Negara menurut Sayyid Quthb*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Rule, James, *Theories of Civil Violence*, Berkeley : Berkeley University Press, 1988.
- Robert Gurr, Ted, *Why Men Rebel*, Princeton, NJ; Princeton University Press, 1950. Sahetapy, J.E., *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung : Penerbit Alumni, 1981.
- Sarapung, Elga, dkk (Tim Ed.), *Spiritual Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2004.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik Jajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Tamara, M. Natsir dan Taher, Elza Taher Peldi (editor), *Agama Dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996.
- Turmudi, Endang (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Zainuddin, A. Rahman, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan